

**ANALISIS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS ASET TETAP PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN, PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA TAHUN ANGGARAN 2014 – 2016**

Toufan Sougi S¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Asep Machpuddin³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2018*

²⁾³⁾*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

Fixed assets are the largest components of a financial entity. The value of large fixed assets has a direct impact on risks in the entity's business finance process. The complexity of asset management, with all its derivative issues becoming an important issue in the transparency of state financial reporting. This study raises issues related to the findings of fixed assets, causes, and the development of follow-up. The purpose of this study is to find the main problem in the management of fixed assets, analyze the factors that affect the findings of fixed assets, and see the progress of the completion of the findings of fixed assets. The research was done by qualitative method, the technique of determining the data source used was purposive sampling, the data collecting was done by document analysis and in-depth interview with semi structured format. Data were analyzed by content analysis method, and data validity was tested by triangulation method.

Keywords: *Fixed Asset, Audit Findings, State Finance*

ABSTRAK

Aset tetap adalah komponen terbesar yang dimiliki suatu entitas keuangan. Nilai aset tetap yang besar berdampak lurus terhadap resiko dalam proses bisnis keuangan entitas. Kompleksitas pengelolaan aset, dengan segala turunan permasalahannya menjadi isu penting dalam transparansi pelaporan keuangan negara. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait temuan aset tetap, penyebab, dan perkembangan tindak lanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah utama dalam pengelolaan aset tetap, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi temuan aset tetap, dan melihat perkembangan penyelesaian temuan aset tetap. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, teknik penentuan sumber data yang digunakan adalah *purposive sampling*, pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan format semi terstruktur. Data dianalisis dengan metode *content analysis*, dan keabsahan data diuji dengan metode triangulasi.

Kata Kunci: *Aset Tetap, Temuan Pemeriksaan, Keuangan Negara*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam penanggulangan inefisiensi manajemen keuangan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi di bidang manajemen keuangan negara, sehingga diharapkan Indonesia lebih sejalan dengan praktek manajemen keuangan negara modern. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang sumber dananya berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Menanggapi tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan (LK) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan yang dimaksud berbentuk Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Tren opini yang mengindikasikan kualitas LKPD di lingkungan provinsi Jambi relatif mengalami kemajuan. Parameter peningkatan kualitas kewajaran penyajian LK dalam hal ini adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Peneliti menemukan bahwa banyak catatan mengenai ketidakwajaran penyajian laporan keuangan khususnya dalam hal ini permasalahan mengenai aset. Hampir seluruh pengecualiaan yang berdampak terhadap materialitas kewajaran penyajian LKPD dipengaruhi oleh salah satu faktor dalam hal aset tetap. Tahun 2016 dimana pertama kali SAP Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, diterapkan dalam hal pelaporan keuangan terdapat penurunan opini pada Pemkab Tanjung Jabung Barat. Sedangkan pada Pemkab Merangin dan Tanjabtim, opini tidak mengalami penurunan, namun dari hasil inventarisasi permasalahan aset, Pemkab Merangin dan Tanjabtim memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki entitas lain di Jambi yaitu, BPK secara spesifik melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan aset tetap yang dilakukan pada tahun 2016, dengan judul LHP “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak”, nomor 30/LHP/XVIII.JMB/10/2016 dan “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko”, nomor 38/LHP/XVIII.JMB/10/2015. Penelitian ini juga merupakan salah satu respon atas diterapkannya SAP akrual, khususnya pada akun-akun yang mengalami dampak signifikan perubahan sistem pencatatan (dalam hal ini diterapkannya metode depresiasi aset).

Tresnawati dan Setiawan (2013: hal. 198-215) mengatakan “Informasi laporan ala akrual ternyata dalam praktiknya bukan merupakan kebutuhan dan memiliki kecenderungan untuk sulit diterapkan, dan salah satu penyebabnya adalah sumber daya manusia yang belum cukup mumpuni untuk melakukan pencatatan sistem akuntansi akrual”. Logikanya, ketika Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan maka kualitas penyajian laporan keuangan juga akan berkurang. Penelitian oleh Tresnawati dan Setiawan dilakukan tahun 2013 dimana saat itu merupakan masa transisi peralihan laporan keuangan dari metode cash toward accrual menuju full accrual (2010 – 2014) sementara laporan keuangan tahun anggaran 2015 sudah diwajibkan menggunakan metode full accrual. Menanggapi hal tersebut penulis mengambil kurun waktu penelitian tahun 2014 – 2017, dibalik maksud penulis mengambil kurun waktu tersebut adalah keinginan untuk melihat fluktuasi opini yang terjadi setelah diwajibkannya Pemerintah Daerah menerapkan metode basis akrual dalam hal pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BPK RI memberikan rekomendasi atas temuan pemeriksaan yang terjadi pada masa transisi pelaporan LKPD, dengan ditentukannya kurun waktu penelitian setelah ditetapkannya kewajiban penerapan basis akrual, selain yang diungkapkan di atas diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan gambaran umum tentang upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya dalam bidang aset tetap, setelah terjadinya penerapan basis akrual.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi permasalahan utama pada pelaporan aset tetap pada Pemda di Jambi (Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan aset tetap pada laporan keuangan Pemda di Jambi (Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
- 3) Perkembangan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan pemerintah Pemda di Jambi (Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur)?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Opini Laporan Keuangan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007) menyatakan bahwa tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Pemberian opini atas laporan keuangan

harus didasarkan pada keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyajian laporan keuangan secara wajar artinya bahwa tidak terdapat salah saji yang material dalam pelaporan keuangan.

2.1.2. Koding Temuan

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* dalam pengerjaannya, sehingga dibutuhkan mekanisme kodefikasi untuk mengklasifikasikan data-data yang akan dianalisis. Penulis mengadopsi metode koding dari BPK RI yang disahkan melalui Surat Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Koding Temuan Pemeriksaan

BPK RI mengeluarkan Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Koding Temuan Pemeriksaan. Untuk menjamin penyajian dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipercaya, maka pengolahan data dan informasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan perlu dilakukan dengan dukungan aplikasi teknologi sistem informasi. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) yang dimulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Koding temuan pemeriksaan adalah kegiatan pemberian kode temuan pemeriksaan berdasarkan atribut yang tersedia dan terintegrasi dengan SMP pada saat temuan tersebut diunggah ke dalam SMP.

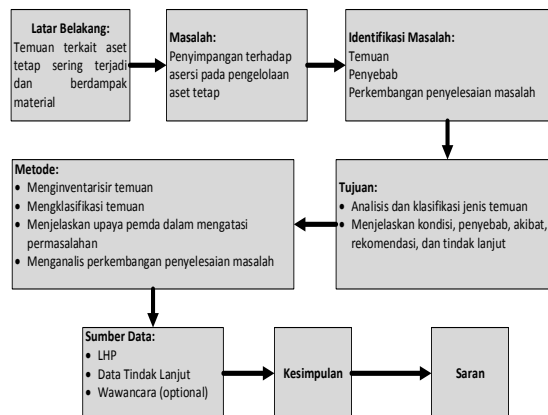
Tujuan Koding Temuan Pemeriksaan menurut Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Koding Temuan Pemeriksaan adalah:

- 1) Memberikan panduan bagi pemeriksa dalam menentukan area risiko (risk area) atau kemungkinan permasalahan yang dapat diungkap dalam temuan pemeriksaan;
- 2) Memberikan pedoman dalam menentukan kelompok permasalahan dan rekomendasinya sebagai atribut yang harus disertakan saat input temuan pemeriksaan ke dalam SMP;
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dengan dukungan aplikasi teknologi sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemeriksaan (SMP); dan
- 4) Memudahkan para pemilik kepentingan dalam memilih informasi yang dibutuhkan dengan memasukkan query berdasarkan kode yang tersedia.
- 5) Namun, dalam konteks penelitian makan koding digunakan untuk memilih informasi yang dibutuhkan dengan *query* berdasarkan kode yang tersedia. Dengan kodefikasi yang sedemikian rupa diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang sederhana tentang gambaran kondisi permasalahan di suatu entitas.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar. 1
Kerangka Pemikiran



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah temuan BPK-RI terkait aset tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Populasi penelitian adalah temuan pemeriksaan dari subjek penelitian selama kurun waktu 2014 - 2016, yang kemudian akan diambil sampelnya dengan metode purposive sampling.

Data yang digunakan adalah data sekunder dari LHP Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data Laporan Keuangan (audited) ini diperoleh dari BPK-RI, sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai eksternal audit dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s.d 2016 dan telah dipublikasikan.

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Pemerintah Kabupaten Merangin pada kurun waktu tahun anggaran 2014 – 2016.

3.2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan mengapa fenomena itu terjadi. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis konten.

Peneliti hendak memperoleh informasi yang mendalam terkait suatu hal yang memiliki karakteristik tertentu, oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling / judgmental Sampling dalam melakukan pengambilan sampel. Purposive

sampling adalah cara yang digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya (Ibrahim, 2015).

3.3. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis Analisis Konten (Content Analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Informasi yang diperoleh diuraikan secara objektif, sistemik, dan kuantitatif (Berelson, 1952). Dalam kesempatan lain analisis konten didefinisikan sebagai metode penelitian untuk menentukan keberadaan kata-kata atau konsep -konsep di dalam teks atau satu set rangkaian teks. (Imam Gunawan, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Temuan Jumlah Aset Tetap

Hasil dari sampling yang dilakukan penulis maka diperoleh 58 temuan aset tetap. Angka 58 temuan tersebut adalah 35% dari 166 total temuan yang ada. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Merangin, Tanjabbar, dan Tanjabtim adalah temuan terkait aset tetap.

Tabel 1.
Jumlah Temuan Aset Tetap Tiap LHP

Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran	Opini	Jumlah Temuan Aset Tetap	Jumlah Temuan Pemeriksaan	Present ase
Tanjabtim	2014	WTP-DPP	6	15	40%
	2015	WDP	7	23	30%
	2016	WDP	4	16	25%
Tanjabbar	2014	WDP	6	21	29%
	2015	TMP	6	22	27%
	2016	WTP	6	15	40%
Merangin	2014	WDP	7	22	32%
	2015	WDP	7	15	47%
	2016	WTP	9	17	53%
Jumlah temuan aset			58	166	35%

Sumber: LHP LKPD TA 2014-2016

4.2. Analisis Nilai Temuan Aset Tetap

Hasil dari sampling yang dilakukan peneliti maka diperoleh 58 temuan aset tetap. Angka 58 temuan tersebut adalah 35% dari 166 total temuan yang ada. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Merangin, Tanjabbar, dan Tanjabtim adalah temuan terkait aset tetap.

Tabel 2.
Jumlah Temuan Aset Tetap Tiap LHP

Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran	Opini	Jumlah Temuan Aset Tetap	Jumlah Temuan Pemeriksaan	Present ase
Tanjabtim	2014	WTP-DPP	6	15	40%

	2015	WDP	7	23	30%
	2016	WDP	4	16	25%
Tanjabbar	2014	WDP	6	21	29%
	2015	TMP	6	22	27%
	2016	WTP	6	15	40%
Merangin	2014	WDP	7	22	32%
	2015	WDP	7	15	47%
	2016	WTP	9	17	53%
Jumlah temuan aset			58	166	35%

Sumber: LHP LKPD TA 2014-2016

Tabel 2 menyebutkan bahwa terdapat 58 temuan, atau senilai 35% dari jumlah temuan pemeriksaan. LHP LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2014 menunjukkan terdapat enam temuan aset tetap dari 15 temuan pemeriksaan atau sebesar 40% dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas. Tahun berikutnya terdapat tujuh temuan aset tetap dari total 23 temuan pemeriksaan atau sebesar 30%, sedangkan pada tahun 2016 terdapat empat temuan aset tetap dari 16 temuan pemeriksaan sejumlah atau sebesar 25% dari seluruh temuan pemeriksaan pada tahun tersebut. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan secara sederhana temuan aset tetap dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah tetapi jumlah temuan aset tidak mempengaruhi opini yang diperoleh, hal ini dibuktikan bahwa meskipun mengalami penurunan jumlah temuan terkait aset tetap, Pemkab Tanjabtim justru mengalami penurunan opini dari WTP-DPP menjadi WDP.

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa pada LHP LKPD Tanjung Jabung Barat TA 2015 terdapat enam temuan terkait aset tetap dari total 21 temuan atau sebesar 29% dari seluruh temuan pemeriksaan TA 2014. Kemudian, tahun berikutnya diketahui bahwa terdapat enam temuan terkait aset tetap dari 22 temuan pemeriksaan atau sebesar 27% dari seluruh temuan pemeriksaan pada TA 2015. Tahun 2016 terdapat enam temuan terkait aset tetap dari 15 temuan pemeriksaan atau sebesar 40% dari total temuan pemeriksaan atas LKPD TA 2016. Kesimpulan sementara yang bisa diperoleh sejalan dengan entitas sebelumnya bahwa secara kuantitatif banyaknya temuan terkait aset tetap tidak sebanding dengan opini yang diperoleh. Sebagai contoh, pada TA 2015 dengan jumlah temuan yang sama dengan TA 2016 diperoleh opini yang berbeda. Terjadi peningkatan yang signifikan dari opini tidak memberikan pendapat menjadi opini wajar tanpa pengecualian.

Masih dari data pada tabel 2 diketahui bahwa terdapat tujuh temuan aset tetap dari 22 temuan pemeriksaan atau sebesar 32% dari total temuan pemeriksaan pada tahun tersebut. Tahun berikutnya terdapat tujuh temuan aset tetap dari 15 temuan pemeriksaan atau sebesar 47% dari total temuan pemeriksaan pada TA 2015. Sedangkan pada TA 2016 terjadi peningkatan jumlah temuan aset menjadi sembilan temuan terkait aset tetap dari 17 temuan

pemeriksaan atau sebesar 53% dari total temuan pemeriksaan pada tahun tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari kondisi di Merangin adalah sama seperti kesimpulan sebelumnya bahwa secara jumlah, banyaknya temuan aset tetap tidak mempengaruhi opini yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilihat dari opini yang diperoleh pada TA 2016, meskipun hampir separuh temuan adalah terkait aset tetap, namun opini yang diberikan adalah opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Dari ketiga entitas yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya temuan aset tetap tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang pada akhirnya bermuara pada opini atas LKPD. Hal tersebut sejalan dengan kaidah yang dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa opini yang diberikan oleh BPK dipengaruhi oleh kewajaran penyajian laporan keuangan.

4.3. Analisis Nilai Temuan Aset Tetap

Hasil analisis tabulasi data temuan aset tetap terhadap pergerakan opini, diketahui bahwa besarnya nilai temuan aset tetap tidak berdampak lurus terhadap perolehan opini. Besarnya nilai temuan aset tetap seringkali hanya menunjukkan, ketidaktertiban administrasi dalam penyajian atau belum tentu merupakan pelanggaran serius terhadap suatu ketentuan.

4.4. Klasifikasi Jenis Temuan Aset Tetap

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis*. Dalam metode tersebut kategorisasi teks merupakan ciri paling fundamental dalam memahami makna dan isi pesan sebuah komunikasi dalam analisis isi. Berdasarkan hasil kategorisasi temuan aset tetap maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.
Rekapitulasi Jenis Temuan Terkait Aset Tetap
Pemkab Merangin TA 2014 - 2016

No	Jenis Temuan	Kode Sub Kelompok Temuan	Jumlah Temuan
1	Aset dikuasai Pihak Lain	10203	1
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	10406	1
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	20101	13
4	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	20102	9
5	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	20304	7
Jumlah			31

Tabel 4.
Analisis Temuan Aset Tetap
Pemkab Tanjabbar TA 2014 - 2016

No	Jenis Temuan	Kode Sub Kelompok Temuan	Jumlah Temuan
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	10406	3
2	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	10414	1
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	20101	5
4	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	20102	11
5	Perencanaan kegiatan tidak memadai	20201	1
6	Kelemahan pengelolaan fisik aset	20207	1
7	Lain-lain Penjelasan: Kelemahan pengelolaan fisik aset	20299	1
8	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	20304	3
Jumlah			26

Tabel 5.
Analisis Temuan Aset Tetap
Pemkab Tanjabtim TA 2014 - 2016

No	Jenis Temuan	Kode Sub Kelompok Temuan	2014	2015	2016
			WTP-DPP	WDP	WDP
1	Lain-lain Penjelasan: -	10199	1	0	0
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	10406	2	2	2
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	10414	2	1	0
4	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	20101	3	1	2
5	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	20102	4	4	2
6	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	20301	0	0	1
Jumlah			12	8	7

4.5. Analisis Penyebab Temuan Aset Tetap

Dalam konteks penelitian akademis yang bersifat kualitatif, subjektivitas peneliti menggali akar permasalahan dengan merekapitulasi penyebab temuan aset tetap tersebut muncul. Hasil dari analisis peneliti dituangkan dalam tabulasi sebagaimana dapat dilihat pada lampiran. Peneliti mencatat setidaknya terdapat 54 kata lalai yang disebutkan dalam penyebab permasalahan, terdiri dari 17 kata lalai pada Pemkab Tanjabbar, 13 kata lalai pada Pemkab Tanjabtim, dan 24 kata lalai dalam Pemkab Merangin. Kelalaian tersebut menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan yang ada. Peneliti juga mencatat bahwa

kelalaian tersebut dilakukan oleh individu pemegang kekuasaan dalam pengelolaan aset tetap mulai dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang, Pengurus Barang, dan Inspektur sebagai pengendali internal. Peneliti menarik kesimpulan dari tabulasi penyebab permasalahan yang ditampilkan tersebut adalah kelemahan sumber daya manusia baik dari segi kompetensi maupun segi kedisiplinan. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait bahwa penyebab utama munculnya permasalahan terkait aset tetap adalah kelemahan sumber daya manusia baik dari kompetensi dan segi kuantitas.

4.6. Perkembangan Penyelesaian Permasalahan Terkait Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Merangin belum melakukan upaya yang berarti dalam mengatasi temuan terkait aset tetap. Tidak ada satupun dari temuan terkait aset tetap yang ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti penyebab hal tersebut, kompleksitas masalah, banyaknya pihak yang terlibat, dan itikad dari Pemkab terkait disinyalir menjadi penyebab. Peneliti juga menduga bahwa permasalahan terkait sistem pengendalian internal dianggap tidak memiliki urgensi atas keberlangsungan dinasti politik, lain halnya jika temuan tersebut memiliki dampak hukum yang berat terhadap perorangan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait. Hal tersebut juga ditanggapi oleh pemeriksaan BPK dengan adanya temuan berulang. Temuan berulang adalah temuan yang kondisinya sama persis dengan tahun anggaran sebelumnya namun memiliki dampak akumulatif terhadap penyajian laporan tahun berjalan.

Dari 18 temuan aset tetap tiga buah temuan sudah ditindaklanjuti dan sudah menyelesaikan masalah, sementara hasil konfirmasi dengan BPK, 15 temuan lainnya tindak lanjut hanya berupa surat teguran atau sanksi kepada pejabat terkait.

Dari 18 temuan aset tetap Pemkab Tanjabtim menindaklanjuti tiga buah temuan, namun secara substansi hal tersebut belum menyelesaikan masalahnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari Analisis Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014 – 2016 adalah sebagai berikut

Penulis melakukan analisa temuan terkait aset tetap dan dampaknya terhadap opini laporan keuangan dari beberapa prespektif, yaitu prespektif jumlah temuan aset tetap, besaran nilai temuan aset tetap, jenis temuan aset tetap.

- 1) Banyaknya temuan aset tetap tidak berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan, hal ini didasari tidak berbanding lurusnya antara jumlah temuan terkait aset tetap dengan opini laporan keuangan yang merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan
- 2) Besarnya nilai temuan aset tetap tidak berpengaruh pada opini laporan keuangan hal ini didasari tidak berbanding lurusnya antara jumlah temuan terkait aset tetap dengan opini laporan keuangan yang merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan
- 3) Jenis temuan aset tetap berpengaruh terhadap opini laporan keuangan, hal ini didasari pada beberapa jenis temuan dengan karakteristik tertentu diketahui menjadi pengecualian yang berdampak material pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
- 4) Masing-masing entitas memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
- 5) Lemahnya pengendalian internal mempengaruhi munculnya temuan terkait aset tetap tersebut. Kelemahan pengendalian internal tersebut menjadi catatan khusus yang dinyatakan BPK RI pada laporan atas pengendalian internal.
- 6) Kelemahan pengendalian internal tersebut terkait hal-hal integritas, komitmen terhadap kompetensi, gaya operasi manajemen, pendelegasian tanggung jawab, kebijakan – praktek sumber daya manusia. Hasil analisis dari laporan hasil pemeriksaan dan observasi dengan Pemda terkait menunjukkan kondisi yang identik yaitu permasalahan SDM.
- 7) Perkembangan penyelesaian permasalahan terkait aset tetap sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan munculnya temuan berulang, dan rendahnya upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rekomendasi BPK RI terkait permasalahan aset tetap. Hal tersebut linear dengan hasil observasi di Pemda, dimana ditemukan kondisi bahwa Pemda kesulitan dalam melakukan penatausahaan aset bermasalah yang diperoleh pada masa yang sudah lampau (kurang lebih 10 tahun).

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah terkait harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan terkait aset tetap.
- 2) Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen terhadap langkah-langkah strategis tersebut.
- 3) Permasalahan terkait aset tetap merupakan masalah yang memiliki dampak kumulatif dan harus diselesaikan dalam waktu yang tidak sebentar,

upaya penyelesaian masalah terkait aset tetap sepatutnya disterilkan dari kepentingan politik.

- 4) Temuan terkait aset tetap merupakan dampak kumulatif dari lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya kelemahan sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan. Hal tersebut didasari dari pernyataan BPK RI dalam LHP bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah kelalaian pejabat terkait.

Temuan terkait aset tetap tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan dampak kumulatif dari lemahnya pengendalian internal, terutama kelalaian pejabat terkait. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait dari perspektif literatur. Penelitian berikutnya mungkin akan menjadi lebih baik jika diperkuat dari analisa sosial yang menggali lebih dalam tentang penyebab kelemahan pengendalian internal tersebut.

DAFTAR REFRENSI

- Atyanta, Ramya. *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)*
- Andrew, A. & Pitt, M., *Property Depreciation in Government*, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 24 No. 3, 2006 pp. 259-263
- BPK RI 2007, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta.
- BPK RI 2016, *Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- BPK RI 2012, *Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*, Jakarta.
- Dewi, Hilda Gustrina. *Analisis Hasil Audit BPK-RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga*, Thesis Magister Akuntansi – Universitas Indonesia, 2012.
- Kamayanti, Ari, *Akuntansiasi atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Halaman 369-540, Vol. 2, No. 3, 2011.
- Liamputtong, Pranee. *Qualitative Research Methods – Third Edition*, Oxford, 2009.
- Mills, Wright C. , *The Social Imagination*, Oxford University Press, 1959.
- Pardede, Parlindungan. *Penelitian Grounded Theory*, Applied Linguistics Research Methodology, 2009.
- Republik Indonesia 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, CV.Tamita Utama, Jakarta.
- Republik Indonesia 2004, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, Jakarta.
- Sahlan, Muhammad. *Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Entitas Pemerintah di Provinsi Papua Barat)*, Skripsi FEB – Universitas Diponegoro, 2015.
- Sipahutar, H & Khairani, S. *Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang*, STIE MDP, 2013
- Sukoharsono, E. & Halim, A. 2005. *Dialektika Kritis Laporan Keuangan atas Representasi Kinerja Perusahaan (Studi Perusahaan pada Industri Food and Beverages yang Go Public di Bursa Efek Jakarta)*. Universitas Brawijaya
- Tresnawati, E. & Setiawan, A. 2013. Ada Apa dengan SAP Akrual? *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*. Vol.2 hal.165-329.
- <https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/10/25/content-analysis/> 10 Juni 2017
- <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/> diakses 10 Juni 2017